

# ANALISIS PERBEDAAN PSAK 50 & PSAK 55 DAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN PT.BPR PHIDECTAMA ABEPURA (Studi Kasus: PT. BPR Phidectama Abepura)

Nelly Austin Fonataba <sup>1</sup>

[ly.nelly01@gmail.com](mailto:ly.nelly01@gmail.com)

Dr. Paulus K. Allo Layuk, SE., M.Si., Ak., CA<sup>2</sup>

Cornelia D. Matani, SE., M.Mgt.(Acc)<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

## ABSTRACT

*There is a change in financial reporting from the policy before, namely PSAK 50 and 55 and the policy after, namely SAK ETAP (Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability). This study aims to identify and analyze differences in financial reporting at PT. BPR Phidectama Abepura according to the policy before and after using SAK ETAP. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, namely analyzing the results of the study using several lists of interview questions to the President Director of PT. BPR Phidectama Abepura is related to the preparation and changes to the financial statement accounts of the balance sheet and profit and loss section of the policies before and after, and then described in accordance with the literature that has been obtained.*

*The results of this study indicate that the preparation of the balance sheet and profit and loss at PT. BPR Phidectama Abepura in 2008 and 2010 still did not experience many changes, it can be said that the financial statements as of December 2010 had not fully implemented SAK ETAP in accordance with the circulating BI letter, therefore the account that changed was only in the income statement. In contrast to the preparation of the balance sheet and profit and loss in 2011, where the preparation of the 2011 financial statements has fully used SAK ETAP. Therefore, there are significant account changes in accordance with applicable policies and in accordance with the characteristics of the BPR.*

**Keyword: Financial Statements; PSAK 50 and 55; SAK ETAP**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sistem yang membangun perekonomian dan keuangan di Indonesia. Perbankan ini juga ialah penyedia dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis yang ingin melaksanakan fungsi produksinya. Oleh karena itu, untuk berjalan lancarnya sebuah bank, lembaga perbankan harus berjalan dengan baik juga. Didalam sebuah perbankan dibagi menjadi dua jenis perbankan yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Seiring perkembangan ketentuan yang dilakukan, PSAK mengadopsi

<sup>1</sup> Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS-*International Finance Reporting Standards*) bagi perbankan namun, proses ketentuan ini masih banyak mengalami kendala bagi beberapa sektor industri mikro dan menengah, salah satunya ialah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana BPR sebagai salah satu industri yang menghimpun dana dari masyarakat. Seiring perkembangan ketentuan yang dilakukan, PSAK mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS-*International Finance Reporting Standards*) bagi perbankan namun, proses ketentuan ini masih banyak mengalami kendala bagi beberapa sektor industri mikro dan menengah, salah satunya ialah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana BPR sebagai salah satu industri yang menghimpun dana dari masyarakat.

Berdasarkan surat yang diberikan oleh BI mengenai penerbitan SAK ETAP No.11/37/DKBU perihal penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar akuntansi BPR tahun 2010, bersamaan dengan dikeluarkannya SAK ETAP, IAI juga mengeluarkan Pedoman Akuntansi BPR (PABPR) yang dibuat guna menyesuaikan kondisi dan prinsip operasional akuntansi BPR yang dapat dikatakan menggunakan transaksi-transaksi sederhana. SAK ETAP ini dibuat untuk pelaporan besar dengan menghilangkan beberapa akun yang dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan karakteristik dari BPR tersebut.

Dalam penelitian ini, objek pusat penelitian ialah PT. BPR Phidectama Abepura. Dimana BPR ini berdiri sebelum tahun 2010 yang mana sistem pelaporannya masih menggunakan PSAK 50 dan 55 dan lalu menyesuaikan dengan kebijakan baru sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu SAK ETAP yang selanjutnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas dalam mengawasi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan ulang mengenai perubahan tersebut dengan judul penelitian “ANALISIS PERBEDAAN PSAK 50 & PSAK 55 DAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BPR PHIDECTAMA ABEPURA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana perbedaan pelaporan keuangan pada PT. BPR Phidectama Abepura menurut PSAK 50 & PSAK 55 dan SAK ETAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman ialah Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pelaporan keuangan pada PT. BPR Phidectama Abepura menurut penggunaan PSAK 50 & PSAK 55 dan penggunaan SAK ETAP.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut (IAI, 2009), adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus

kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

## **2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Menurut (Dermauli & Risnawati, 2006) Standar akuntansi akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Standar akuntansi pada umumnya diterima sebagai aturan perusahaan yang di ikuti dengan sanksi-sanksi terhadap ketidakpatuhan. PSAK yang digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah PSAK 50 dan PSAK 55, dimana pada PSAK perlakuan akuntansi diatur baik dalam paragraf Pernyataan Standar maupun Panduan Aplikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Standar.

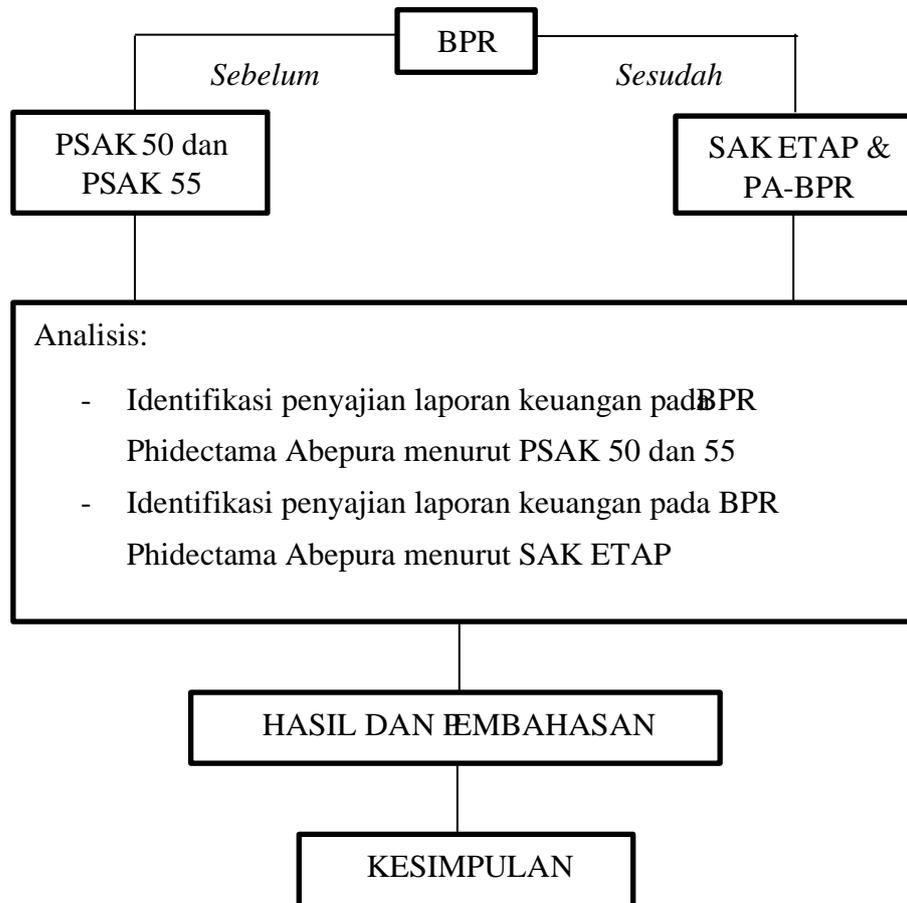
## **2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

PSAK yang disederhanakan untuk pengukuran pengakuan dan mengurangi pengungkapan. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar kebijakan ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Menurut (IAI, 2016b) SAK ETAP ini merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. Berdasarkan ruang lingkup, maka ada penambahan SAK ETAP yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Ekonomi, dan Menengah (SAK EMKM) di tahun 2016 berdasarkan ruang lingkup dimana SAK EMKM ini berlaku untuk UMKM yang masih sangat sederhana dari pada SAK ETAP.

## **2.4 Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR)**

Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan pembantu dalam pelaksanaan dari SAKETAP yang memuat penjelasan dan contoh yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK-ETAP bagi BPR. Pemberlakuan PA-BPR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2010. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari SAK-ETAP, oleh karena itu untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PA-BPR tetap mengacu kepada SAK-ETAP yang berlaku.

## 2.5 Kerangka Pemikiran



## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di PT. BPR Phidectama Abepura, yang berada di Jl. Raya Abepantai Tanah Hitam Abepura Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Komperatif dimana peneliti mengumpulkan data, menganalisis, dan membandingkan perbedaan penggunaan SAK ETAP dan PSAK 50 dan 55 pada BPR berdasarkan laporan yang disajikan. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh BPR di Kota Jayapura dimana terdapat 5 BPR yakni PT. BPR Irian Sentosa, PT. BPR Phidectama Abepura, PT. BPR Papua Mandiri Makmur, PT. BPR Sunni, dan PT. BPR Anak Negeri Papua. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang bersifat Nonprobability dengan beberapa kriteria yaitu BPR yang berdiri sebelum penerapan kebijakan SAK ETAP yang diterapkan (sebelum tahun 2010) dan BPR yang dapat ditinjau dalam pengambilan data secara langsung. Jenis data yang digunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Interview, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa tahap yaitu mengumpulkan data, menarik kesimpulan, menyajikan dan membandingkan laporan keuangan, dan menarik kesimpulan dari sajian data yang telah diperoleh dalam bentuk pernyataan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### **Kebijakan Akuntansi PT. BPR Phidectama Abepura**

1. Semua Laporan Keuangan dibuat berdasarkan SAK ETAP yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009 dan digunakan pada saat tahun 2010 dengan penyesuaian dengan kebijakan sebelumnya, BI menerbitkan SAK ETAP No.11/37/DKBU perihal penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar akuntansi BPR. Setelah tahun 2010 hingga saat ini, BPR Phidectama Abepura murni menggunakan SAK ETAP sebagai dasar pelaporan keuangannya.
2. Dasar pengukuran Aset Tetap dan Inventaris di BPR Phidectama Abepura disajikan berdasarkan nilai perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan jenis asset dan masa pemberlakuan amortisasinya.
3. Pengakuan Pendapatan dan Beban diakui pada saat diperoleh atau menggunakan pencatatan basis akrual dan basis kas. Di BPR Phidectama Abepura basis akrual di pakai untuk mengakui Pendapatan Bunga Diterima Dimuka yang berlaku untuk kredit dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus (Masa tunggakan 30 hari) dan Pendapatan Provisi Komisi yang bukan lagi menggunakan Basis kas, melainkan menggunakan Basis akrual.

BPR Phidectama Abepura menggunakan kebijakan perbankan umum sejak berdirinya pada tahun 1994 sampai pada tahun 2009 dan karena beratnya kebijakan yang digunakan oleh seluruh BPR di Indonesia, maka lahirlah kebijakan baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disahkan oleh IAI beserta Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut surat edaran untuk penggunaan kebijakan baru, pelaporan keuangan untuk semua BPR di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan SAK ETAP pada pelaporan 31 Desember 2010. Awal kebijakan ini digunakan, BPR Phidectama Abepura merubah sistim pelaporannya berdasarkan SAK ETAP dan setiap akun dalam pelaporannya di rancang oleh vendor BPR agar sesuai dengan kebijakan yang diharuskan. Namun, pelaporan pada BPR Phidectama Abepura pada saat 31 Desember 2010, masih belum berubah total atau masih dalam masa transisi (Penyesuaian) dari kebijakan sebelumnya.

Pelaporan keuangan pada BPR Phidectama Abepura murni telah sesuai dengan kebijakan SAK ETAP pada tahun 2011. Laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada pelaporan per 31 Desember 2011, pada laporan tersebut adanya perubahan akun dan penambahan akun berdasarkan kebijakan baru (SAK ETAP). Oleh karena itu, apabila dilihat dengan laporan pada tahun sebelum dimana masih menggunakan PSAK 50 dan 55 dan setelah menggunakan SAK ETAP akan adanya perubahan atau pergeseran kolom laporan keuangan dari sebelum dan sesudah.

Berdasarkan laporan keuangan Neraca PT. BPR Phidectama Abepura pada tahun 2008 dan 2010, terlihat bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada akun neraca di tahun 2010. Menurut bapak Abraham Fonataba selaku Direktur Utama, tidak adanya perubahan pada neraca tahun 2010 dikarenakan pelaporan pada Desember 2010 masih dalam masa transisi (penyesuaian), maka perubahan akun neraca berdasarkan SAK ETAP belum diterapkan pada tahun 2010 oleh BPR Phidectama Abepura. Artinya, masih pelaporan berdasarkan PSAK 50

dan 55 untuk Perbankan yang disesuaikan dengan BPR. Berdasarkan Laba Rugi PT. Phidectama Abepura tahun 2008 dan 2010, terlihat bahwa adanya penambahan akun pada bagian beban operasional dimana pada bagian bunga ada penambahan akun Koreksi Atas Pendapatan Bunga. Koreksi atas pendapatan bunga dimasukkan dalam akun laba rugi berdasarkan SAK ETAP karena dalam kebijakan ini ada ketentuan mengenai Pendapatan Bunga yang diterima dari kredit dengan kualitas lancar. Sedangkan dalam ketentuan PSAK 50 dan 55, tidak menyajikan akun tersebut dalam akun laba rugi. Artinya, nominal untuk koreksi atas pendapatan bunga tidak bernilai, karena pada BPR Phidectama Abepura tidak ada koreksi atas pendapatan bunga. Maka dari laporan keuangan tahun 2008 dan 2010 bagian neraca dan laba rugi, dapat disimpulkan bahwa perubahan akun berdasarkan SAK ETAP belum konsisten diterapkan dalam pelaporan per desember tahun 2010 dan masih sebagian besar menggunakan sistem pelaporan berdasarkan PSAK 50 dan 55.

Berdasarkan Neraca PT. BPR Phidectama Abepura tahun 2008 dan 2011 adanya penambahan 15 akun baru pada neraca bagian aktiva dan pasiva, yang sebelumnya tidak terdapat dan tidak dijabarkan dalam laporan keuangan neraca berdasarkan PSAK 50 dan 55 maupun SAK ETAP atau sebaliknya.

Akun-akun baru yang terdapat dalam neraca bagian aktiva sesuai pelaporan keuangan PT. BPR Phidectama Abepura yakni:

- 1) Kas Dalam Valuta Asing, dimana pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 tidak disajikan dalam neraca bagian aktiva. Sedangkan, pada pelaporan berdasarkan SAK ETAP Kas dalam valuta asing disertakan dalam aktiva neraca, pernyataan ini diatur dalam SAK ETAP 26 tentang Transaksi dalam mata uang asing. Untuk penyajian Kas dalam mata uang asing disajikan dalam pos tersendiri. Pada PT.BPR Phidectama Abepura tahun 2011 nominal dari akun ini masih tidak bernilai, dikarenakan BPR ini tidak adanya transaksi mata uang asing.
- 2) Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, dimana pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 tidak disajikan dalam neraca bagian aktiva. Sedangkan, pada penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP Pendapatan bunga diakui berdasarkan Basis akrual, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (Masa tunggakan  $\leq$  30 hari). Dalam penyajian pos pokok ini, adapun Penyisihan Kerugian yang diikuti sertakan sebagai bentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dalam pendapatan bunga dari pemberian kredit. Jika dilihat dari laporan keuangan neraca tahun 2011, pendapatan bunga ada nominalnya. Itu dikarenakan pendapatan bunga menurut SAK ETAP akan selalu ada nominalnya setiap laporan bulanan karena masuk dalam pendapatan dari kredit lancar.
- 3) Penempatan Pada Bank Lain, dimana pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 disajikan dengan sebutan Antar Bank Aktiva dalam neraca bagian aktiva. Sedangkan, dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, akun ini merupakan pos yang berdiri sendiri guna menunjang kelancaran aktivitas operasional BPR untuk memperoleh penghasilan meliputi tagihan atau simpanan milik BPR Phidectama Abepura kepada bank lain.
- 4) Agunan Yang Diambil Alih, dimana pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 tidak disajikan dalam neraca bagian aktiva. Sedangkan, dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, Agunan yang diambil alih ini disajikan secara terpisah dari aktiva

lainnya sebesar nilai wajar yang sudah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

- 5) Aset Tetap dan Inventaris, pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 disajikan dalam bentuk penjabaran akun yakni Tanah dan Gedung, Akumulasi Penyusutan Gedung, Inventaris, dan Akumulasi Penyusutan Inventaris. Sedangkan, pada laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, sajian aset tetap dan inventaris disajikan tanpa ada penjabaran akun aset tetap dan inventaris yang ada dalam BPR tersebut. Hal ini dikarenakan aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai bukan menghitung nilai masing-masing aset ataupun inventaris.
- 6) Aset Tidak Berwujud, dimana pada laporan berdasarkan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan dalam neraca bagian aktiva. Sedangkan, berdasarkan pelaporan keuangan SAK ETAP akun ini merupakan pos yang berdiri sendiri sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud ini dalam laporan keuangan neraca PT.BPR Phidectama Abepura pada tahun 2011 mempunyai nilai dengan nominal 1 karena nominalnya telah diamortisasi yang sisa nominal ialah 1, dimana aset tidak berwujud ini yang dimaksudkan ialah Sistem yang dimiliki oleh PT. BPR Phidectama Abepura.
- 7) Aset Lain-lain, pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan dalam pos tersendiri melainkan dalam rupa-rupa aktiva. Sedangkan, berdasarkan pelaporan keuangan SAK ETAP aset lain-lain merupakan pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk dapat disajikan tersendiri dalam laporan keuangan.

Adapun akun-akun baru yang terdapat dalam neraca bagian pasiva sesuai pelaporan keuangan PT. BPR Phidectama Abepura yakni:

- 1) Utang Bunga, berdasarkan laporan keuangan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan sebagai pos tersendiri dibagian Pasiva/Kewajiban. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP akun utang bunga ini menjadi pos tersendiri yang baru disajikan ketika kebijakan ini diterapkan. Menurut SAK ETAP dalam PA-BPR Utang bunga disajikan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Misalnya dana pihak ketiga (Tabungan dan Deposito).
- 2) Utang Pajak, berdasarkan laporan keuangan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan sebagai pos tersendiri. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP akun Utang pajak ini disajikan untuk pajak penghasilan badan yang terutang , Utang Pajak PPh 21, Utang Pajak PPh 23 (Tabungan dan Deposito) atas penghasilan BPR. Utang pajak ini menurut SAK ETAP ialah hasil dari selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah perhitungan pajak dibayar dimuka.
- 3) Simpanan, berdasarkan laporan keuangan PSAK 50 dan 55 akun simpanan tidak disajikan dengan penjabaran dari tabungan dan deposito, karena pos tabungan dan pos deposito berdiri sendiri. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP akun simpanan ini dijabarkan menjadi dua akun yakni: Tabungan dan Deposito.
- 4) Simpanan dari Bank Lain, berdasarkan laporan keuangan PSAK 50 dan 55 akun tersebut diidentifikasi dari akun Antar Bank Pasiva. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP akun

ini berubah nama menjadi simpanan dari bank lain, dimana kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan ataupun deposito.

- 5) Dana Setoran Modal-Kewajiban menurut (Pedoman Akuntansi BPR, 2010) merupakan dana yang disetor secara rill ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Berdasarkan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan dengan pos tersendiri. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP disajikan dalam pos tersendiri yang diakui sebagai Dana setoran modal-kewajiban.
- 6) Kewajiban Imbalan Kerja, berdasarkan PSAK 50 dan 55 kewajiban imbalan kerja disajikan dalam laporan laba rugi bagian tenaga kerja yang dimana mencakup gaji, upah, dan imbalan lainnya. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP akun tersebut disajikan dalam neraca bagian pasiva yang diakui dari kewajiban yang timbul dari imbalan kerja jangka pendek, pascakerja, jangka panjang ataupun pasangon pada saat pegawai tersebut telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.
- 7) Surplus Revaluasi aset tetap, berdasarkan laporan keuangan PSAK 50 dan 55 akun tersebut tidak disajikan sebagai pos tersendiri. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP disajikan sebagai pos tersendiri dimana merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukannya revaluasi. Surplus revaluasi aset tetap diakui dalam SAK ETAP sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.
- 8) Belum ditentukan tujuannya merupakan laba yang belum dipakai atau laba ditahan. Pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55, akun ini tidak dijadikan pos turunan dari Pos Cadangan melainkan hanya mencantumkan cadangan umum dan cadangan tujuan.

Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP, akun ini di jabarkan dalam pos Cadangan.

Berdasarkan neraca dan laba rugi PT. BPR Phidectama Abepura dapat disimpulkan bahwa penggunaan kebijakan SAK ETAP dalam sistem pelaporan keuangan neraca oleh PT. BPR Phidectama Abepura telah sesuai dengan kebijakan SAK ETAP pada pelaporan tahun 2011. Oleh karena itu, dari pelaporan tahun 2008 dan tahun 2011 terlihat banyak perubahan atau penambahan akun dari aktiva dan pasiva.

Penambahan akun dalam neraca bagian aktiva menurut PT. BPR Phidectama Abepura ialah “Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka itu akan berdampak pada perubahan sistem TI (Teknologi Informasi) BPR karena vendor BPR lah yang akan membuat sistem baru yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat itu. Ketika adanya perubahan sistem yang digunakan, maka struktur inventasi BPR juga akan berubah. Contohnya adanya penambahan akun untuk sistem yang digunakan” ucap bapak (Fonataba, 2021a). Maka dapat dilihat pada laporan tahun 2011, struktur inventasi ini masuk dalam bagian akhir aktiva yaitu Aset Tak Berwujud.

Berdasarkan Laba Rugi PT. BPR Phidectama Abepura tahun 2008 dan 2011 adanya penambahan 3 akun baru dan berubahnya penjabaran 2 akun yang sudah ada, yang sebelumnya tidak terdapat dan tidak dijabarkan dalam laporan keuangan neraca berdasarkan PSAK 50 dan 55 maupun SAK ETAP atau sebaliknya. Akun-akun yang berubah atau yang ditambahkan yakni:

- 1) Transaksi PVA (Pedagang Valuta Asing), pada laporan keuangan laba rugi yang berdasarkan PSAK 50 dan 55, akun tersebut tidak menjadi pos tersendiri dalam pelaporan di BPR. Sedangkan, berdasarkan pelaporan SAK ETAP akun tersebut menjadi pos tersendiri dibagian laba rugi dalam pos Pendapatan Operasional. Akan tetapi nominal pada akun transaksi PVA tahun 2011 di PT. BPR Phidectama Abepura tidak bernilai, karena BPR Phidectama Abepura tidak melakukan transaksi yang meliputi valuta asing baik dalam perdagangan maupun mata uang.
- 2) Koreksi Atas Pendapatan Bunga, terlihat bahwa pada bagian beban operasional dimana pada bagian bunga ada penambahan akun Koreksi Atas Pendapatan Bunga pada tahun 2011. Koreksi atas pendapatan bunga dimasukkan dalam akun laba rugi berdasarkan SAK ETAP karena dalam kebijakan ini ada ketentuan mengenai Pendapatan Bunga yang diterima dari kredit dengan kualitas lancar. Sedangkan dalam ketentuan PSAK 50 dan 55, tidak menyajikan hal tersebut dalam akun laba rugi. Dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nominal untuk koreksi atas pendapatan bunga tidak bernilai, karena pada BPR Phidectama tidak ada koreksi atas pendapatan bunga.
- 3) Biaya Pendidikan, Biaya Penelitian dan Pengembangan, dan Biaya Promosi Dan Edukasi. Ketiga biaya tersebut disajikan dalam penjabaran Beban Operasional pada pelaporan keuangan tahun 2011. Berdasarkan PSAK 50 dan 55, tidak diaturnya biaya-biaya tersebut sebagai pos tersendiri. Sedangkan berdasarkan SAK ETAP, biaya-biaya tersebut diatur sebagai pos tersendiri guna berkaitan dengan pengembangan produk oleh BPR.
- 4) Pendapatan Non Operasional, berdasarkan laporan keuangan menurut PSAK 50 dan 55 di PT. BPR Phidectama Abepura, pendapatan non operasional hanya disajikan sesuai nilai yang diperoleh. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP pendapatan non operasional dijabarkan menjadi empat bagian yaitu Keuntungan penjualan aktiva tetap dan inventaris, bunga antar kantor, selisih kurs dan lainnya.
- 5) Beban Non Operasional, berdasarkan laporan keuangan menurut PSAK 50 dan 55 di PT. BPR Phidectama Abepura, beban non operasional hanya disajikan sesuai dengan nilai yang diperoleh. Sedangkan, berdasarkan SAK ETAP beban non operasional disajikan dengan menjabarkan Kerugian/kehilangan aktiva tetap dan inventaris, Bunga antar kantor, Selisih kurs, dan lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan laba rugi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kebijakan SAK ETAP dalam sistem pelaporan keuangan laba rugi oleh PT. BPR Phidectama Abepura telah sesuai dengan kebijakan SAK ETAP pada pelaporan tahun 2011. Oleh karena itu, dari pelaporan tahun 2008 dan tahun 2011 terlihat adanya perubahan atau penambahan beberapa akun baru dan perubahan penyajian dari akun yang sudah ada sebelumnya.

Dengan adanya penambahan akun dalam laba rugi menurut PT. BPR Phidectama Abepura ini lebih berdampak kepada biaya yang ditanggung oleh BPR, karena dengan adanya penambahan akun baru pada bagian neraca bagian aktiva mengenai aset tak berwujud, maka biaya yang timbul ialah adanya penyusutan aset tak berwujud.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya perubahan yang terjadi di PT. BPR Phidectama Abepura dalam pelaporan keuangannya terkhususnya pada akun dan pengakuan akuntansi untuk akun tertentu dari menggunakan PSAK 50 dan 55 hingga menggunakan SAK ETAP. Dimana pada tahun 2011 laporan keuangan bagian neraca adanya penambahan 7 akun baru pada bagian aktiva dan 8 akun baru pada bagian pasiva. Lalu bagian laporan keuangan laba rugi adanya penambahan 3 akun baru dan 2 akun lama yang di jabarkan ketika menggunakan SAK ETAP.
2. Berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR yang disesuaikan dengan SAK ETAP, laporan keuangan PT. BPR Phidectama Abepura dalam pelaporan keuangannya telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

### 5.2 Saran

Kelak PT. BPR Phidectama Abepura bisa lebih mengembangkan produknya agar sesuai dengan item-item yang telah diatur dalam SAK ETAP terkhususnya pada bagian Transaksi Valuta Asing dan untuk kedepannya PT. BPR Phidectama Abepura harus mampu meningkatkan permodalan, sistem Teknologi Informasi sesuai dengan perkembangannya dan Sumber Daya Manusiannya agar dapat bersaing, bertumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.

### 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini belum menjabarkan terlalu dalam mengenai perlakuan akuntansi pada setiap akun dalam laporan keuangan bagian neraca dan laba rugi berdasarkan PSAK 50 dan 55, oleh sebab itu peneliti menganjurkan untuk penelitian selanjutnya dapat meninjau lebih dalam lagi dari sisi PSAKnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, D. (2012). Standar Pelaporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat : Perbandingan Antara PSAK 50 dan 55 Dengan SAK ETAP BPR. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- BI. (2015). *Pengertian Bank Perkreditan Rakyat*. <http://bi.go.id>
- Fonataba, A. (2021a). *Penjelasan Mengenai Dampak Bagi BPR Pada Saat Menggunakan Kebijakan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangannya*.
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- OJK. (2017). *BANK PERKREDITAN RAKYAT*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (2014a). *Definisi Instrumen Keuangan: Penyajian* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan (ed.); Edisi 2017).
- Sugiyono. (1997). *Metodologi Penelitian Administrasi*. In *CV Alfabeta*.